

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah dan Pembangunan Manusia. Kinerja Keuangan Pemerintah ditinjau dari Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Efektivitas Pajak Daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Tasikmalaya, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta laporan keuangan Kota Tasikmalaya.

3.1.1 Gambaran Umum Kota Tasikmalaya

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari Kota Jakarta, dengan luas Wilayah 18.385 Hektar (183,85 Km²) serta batasan administratif pemerintahan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);

3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semenjak berdiri pada tahun 2001 telah terjadi beberapa perkembangan atau perubahan wilayah administrasi dan luas wilayahnya. Pada tahun 2001, luas wilayah Kota Tasikmalaya yang telah disahkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah 171,56 km², yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan yang memiliki 15 kelurahan dan 54 desa.

Selama periode tahun 2012-2014 kegiatan perekonomian di Kota Tasikmalaya sebagian besar terdiri dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Kategori Industri Pengolahan, Kategori Konstruksi serta Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi. Struktur ekonomi Kota Tasikmalaya pada tahun 2012 sampai tahun 2014 menurut kelompok kategori primer, sekunder dan tersier. Dalam kurun waktu tersebut, tampak bahwa kategori tersier merupakan kategori yang memiliki peranan atau kontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya. Sementara kategori sekunder memiliki peranan atau kontribusi dominan kedua selama tiga tahun berturut-turut.

3.1.2 Rencana Jangka Menengah Kota Tasikmalaya

Visi dan misi, tujuan dan sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

3.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025

Tujuan RPJP Daerah adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, partisipatif, berkeadilan sosial, serta akuntabel, sehingga dapat melindungi kebebasan dan hak asasi masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum. Hal tersebut merupakan prasyarat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adapun arahan pembangunan dalam rencana jangka panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, diantaranya:

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat;

2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani;
4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya. Perwujudan Visi Kota Tasikmalaya didukung oleh karakteristik masyarakat yang dikenal sebagai wirausahawan yang tangguh. Kondisi tersebut akan dapat terwujud jika ada dorongan dan fasilitas yang memadai dari pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman selama ini, belanja pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga alokasi kegiatan belanja pemerintah harus ditekankan pada upaya-upaya pengembangan jiwa entrepreneurship dari para pelaku ekonomi di Kota Tasikmalaya;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi;
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam;
7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan *tourism attractiveness* yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2013: 2), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus sedangkan analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:58).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis pada besarnya pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen., dimana variabel tersebut disesuaikan dengan judul skripsi penulis yaitu: “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan

Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Periode 2004-2018)".

Variabel-variabel sehubungan dengan judul yang diajukan yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2013:59). Bahkan variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya menjadi faktor penyebab yang dapat mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini variabel dependennya. Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel independen adalah: kinerja keuangan diantaranya yaitu Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Efektivitas Pajak Daerah.

2. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dependen adalah Pembangunan Manusia.

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah (X)	Derajat Desentralisasi (X ₁)	Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. (Anggraini, 2015:16)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja keuangan pemerintah adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah				

telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

(Fahmi, 2011:2)

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X ₂)	Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Bisma (2010: 78)			
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (X ₃)	Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.	$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Bisma (2010: 77)			
Efektivitas PAD (X ₄)	Kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
Mahmudi (2016: 141)			
Efektivitas Pajak Daerah (X ₅)	Kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (dianggarkan).	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Mahmudi(2016: 142)			
Pembangunan Manusia (Y)	Pembangunan Manusia merupakan suatu proses yang ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (<i>people</i>).	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	Rasio
<i>(United Nations Development Programme- UNDP)</i>			

3.2.3 Unit Analisis (Kasus) dan Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya (sebagai kasus) dan sampelnya yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya berupa laporan keuangan selama 15 periode yaitu dari tahun 2004 s.d 2018 dan Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan ruang lingkup penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

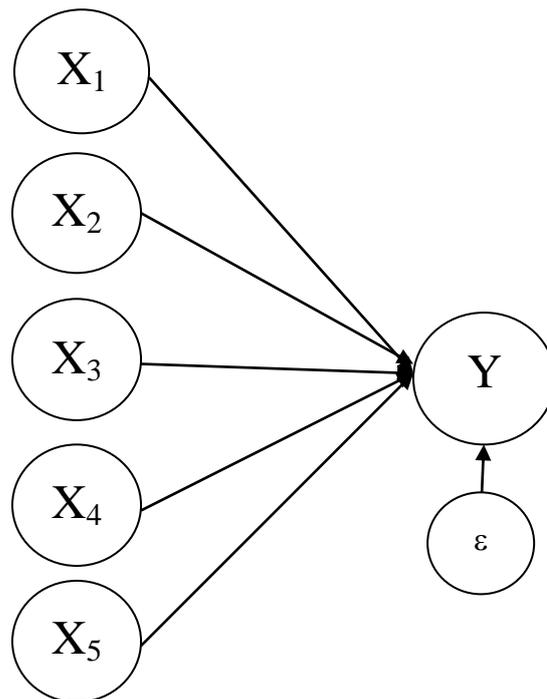
Sumber data yang penulis peroleh merupakan data yang berkaitan dengan kinerja keuangan, dan data tersebut berasal dari sumber data sekunder yang berbentuk *time series* diperoleh dari pemerintah Kota Tasikmalaya berupa laporan keuangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa indeks pembangunan manusia.

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang memadai, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Hasilnya berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar analisis.

3.3 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis serta teknik analisis statistik yang digunakan (Sugiyono, 2013:8). Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian yakni “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Manusia”, maka hasil penelitian digambarkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :

X_1 = Derajat Desentralisasi.

X_2 = Ketergantungan Keuangan Daerah.

X_3 = Kemandirian Keuangan Daerah.

X_4 = Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

X_5 = Efektivitas Pajak Daerah.

Y = Pembangunan Manusia.

ε = Faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang mendasari dalam penggunaan regresi mencakup:

3.4.1.1 Uji Normalitas

Menurut Suliyanto (2011:69), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan SPSS 25.

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Suliyanto (2011:81), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi parsial. Ada tidaknya terjadi multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara koefisien determinasi (R^2) keseluruhan dengan nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien determinasi lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas.

3.4.1.3 Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2011:126), uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Run Test* yaitu metode yang digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Suliyanto (2011:95), uji heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan) (Suliyanto, 2011:95). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen (bebas) dengan nilai absolut residualnya.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2013:277) adalah: “suatu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel dependen mempengaruhi terhadap variabel independen”.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	= Indeks Pembangunan Manusia
X ₁	= Derajat Desentralisasi
X ₂	= Ketergantungan Keuangan Daerah
X ₃	= Kemandirian Keuangan daerah
X ₄	= Efektivitas PAD
X ₅	= Efektivitas Pajak Daerah
a	= Nilai Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄ , b ₅	= Koefisien regresi
e	= Residu

3.4.3 Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel yang dianalisis, dimana hubungan dinyatakan oleh besarnya angka koefisien korelasi dan arah dinyatakan oleh tanda positif atau negatif. Koefisien korelasi dirumuskan sebagai berikut :

$$R_{yx1x2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx1} + r^2_{yx2} - 2r_{yx1}r_{yx2}r_{x1x2}}{1 - r^2_{x1x2}}}$$

(Sugiyono, 2013: 228)

Keterangan :

R_{yx1x2} = Korelasi antara x1 dan x2 bersama-sama dengan Y

r_{yx1} = Koefisien korelasi product momen y dengan x1

r_{yx2} = Koefisien korelasi product momen y dengan x2

$r_{x_1x_2}$ = Koefisien korelasi product momen x_1 dengan x_2

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2013:250)

3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi Korelasi *Product Moment*

Merupakan pengkuadratan dan nilai korelasi (r^2). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Kdr} = \mathbf{r^2 \times 100\%} \quad (\text{Sugiyono, 2013:229})$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

3.4.5 Pengujian Hipotesis

3.4.5.1 Uji-t

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak.

Pengujian hipotesis untuk uji-t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis Operasional

$H_0 : \rho_{YX_1} < 0$	Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_a : \rho_{YX_1} > 0$	Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_0 : \rho_{YX_2} > 0$	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_a : \rho_{YX_2} < 0$	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_0 : \rho_{YX_3} < 0$	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_a : \rho_{YX_3} > 0$	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.

$H_0 : \rho_{YX_4} < 0$	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_a : \rho_{YX_4} > 0$	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_0 : \rho_{YX_5} < 0$	Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.
$H_a : \rho_{YX_5} > 0$	Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia.

2. Menentukan tingkat/ taraf signifikansi atau derajat keyakinan

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat/ taraf signifikansi atau derajat keyakinan sebesar 5% (0,05).

3. Kaidah Keputusan:

- Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3.4.5.2 Uji-f

Uji-f dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis untuk uji-f adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis Operasional

$H_0 : \rho_{YX_1X_2X_3X_4X_5} = 0$ Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Efektivitas Pajak Daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia.

$H_a : \rho_{YX_1X_2X_3X_4X_5} \neq 0$ Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Efektivitas Pajak Daerah) berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia.

2. Menentukan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan sebesar 5% (0,05).

3. Kaidah Keputusan

- a. Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai sig > 0,05, atau F hitung < F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.